



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI
(BIDANG KESEHATAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN POM, BKKBN, ASKES, JAMSOSTEK DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang	:	2008-2009
Masa Persidangan	:	IV
Rapat ke	:	--
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Dengan	:	Kepala BNP2TKI
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Senin, 27 April 2009
Pukul	:	10. ⁰⁰ WIB – selesai
Acara	:	Penjelasan mengenai Permenakertrans No. PER/22/MEN/XII/2008
Ketua Rapat	:	dr. Umar Wahid Hasjim, Sp.P/ Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI
Sekretaris Rapat	:	Dra. Tri Udiartiningrum/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1 Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Anggota	:	orang anggota dari 50 Anggota, orang anggota ijin, orang anggota sakit.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BNP2TKI dibuka pukul 10.15 WIB setelah kuorum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib pasal 99 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBICARAAN

1. Kepala BNP2TKI menjelaskan mengenai Permenakertrans No. PER/22/MEN/XII/2008, dimana kantor Pengacara SAS mewakili masyarakat telah melakukan uji materiil terhadap Permenakertrans No. PER/22/MEN/XII/2008 ke Mahkamah Agung. Adapun keputusan uji materiil dibacakan pada tanggal 19 Maret 2009, maka salinan keputusan uji materiil tersebut diperkirakan sudah dapat diperoleh 3 bulan setelah dibacakan, yaitu tanggal 5 Mei 2009. Keputusan uji materiil mencabut Permenakertrans No. PER/22/MEN/XII/2008.
2. Kepala BNP2TKI menyampaikan rasa kecewa terhadap Komisi IX DPR RI karena tidak memberi dukungan terhadap permasalahan penerbitan Permenakertrans, karena pada saat Pemerintah menerbitkan SKB 4 Menteri, yaitu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan, Nomor: PER.16/MEN/X/2008, Nomor: 49/2008, Nomor: 42.I/M-IND/10/2008, Nomor: 39/m-

DAG/PER/10/08 tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global, Komisi IX DPR RI dapat secara tegas meminta pemerintah untuk mencabut SKB 4 Menteri tersebut. Sedangkan kasus BNP2TKI tidak ada ketegasan dari Komisi IX DPR RI.

3. Kepala BNP2TKI meminta agar BNP2TKI dikoordinasikan oleh Menakertrans, bukan oleh Pejabat Eselon II, Komisi IX DPR RI akan melakukan *cross check* dengan Depnakertrans.
4. Harus dibangun koordinasi yang baik antara BNP2TKI dan Depnakertrans, seperti BKKBN dan Badan POM dengan Menteri Kesehatan.
5. Konflik antara BNP2TKI dan Depnakertrans bukan ranah Komisi IX DPR RI, tetapi ranah hukum (pemerintah). Pada saat Rapat Dengar Pendapat dengan BNP2TKI tanggal 29 Januari 2009 sudah jelas disebutkan, Komisi IX DPR RI telah mengambil sikap dengan menyatakan prihatin terhadap konflik yang terjadi mengenai terbitnya Permenakertrans No.PER/22/MEN/XII/2008 dan konflik tersebut harus segera diakhiri. Adapun yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan adalah Pemerintah atau Presiden. Komisi IX DPR RI telah menyampaikan permasalahan tersebut kepada Ketua DPR RI dan ditindaklanjuti oleh Ketua DPR RI melalui surat No: 03/1054/DPR RI/II/2009 tanggal 16 Februari 2009, Hal: Penyampaian Permasalahan Permenakertrans No:PER/22/MEN/XII/2008 yang ditujukan kepada Presiden RI.
6. Komisi IX DPR RI telah melakukan langkah-langkah sesuai dengan tugas dan fungsi DPR RI. Kepala BNP2TKI diminta untuk mencabut statement kekecewaan kepada Komisi IX DPR RI, mengingat RDP hari ini bersifat terbuka.
7. Kepala BNP2TKI mencabut kembali pernyataan mengenai kekecewaannya kepada Komisi IX DPR RI dan meminta maaf atas pernyataan tersebut.

III. KESIMPULAN

Komisi IX DPR RI meminta BNP2TKI untuk tetap menjalin kerjasama secara intensif dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan Depnakertrans RI dalam mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Hal ini sejalan dengan surat Ketua DPR RI Nomor 03/1054/DPR RI/II/2009 tanggal 16 Februari 2009, Hal: Penyampaian Permasalahan Permenakertrans No: PER/22/MEN/XII/2009, yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia.

Rapat ditutup pukul 11.15 WIB.

Jakarta, 27 April 2009
Pimpinan Komisi IX DPR-RI
Wakil Ketua,



dr. Umar Wahid Hasjim, Sp.P